

**PANDANGAN PUSTAKAWAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR TEHADAP PELARANGAN
BUKU-BUKU KIRI DI ERA ORDE BARU**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan Jurusan Ilmu Perpustakaan
Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar

Oleh

IRSAN

NIM. 40400108025

**JURUSAN ILMU PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada

keluarga penulis yang senantiasa

mencurahkan dan memberikan motivasi

hingga selesainya karya ini.

Karya ini juga ku persembahkan kepada

pegiat dan pejuang literasi dan pustakawan

dimanapun berada, semoga Jaya dalam setiap zaman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“Yakin Usaha Sampai”
ALAUDDIN

MAKASSAR
“Karena Nama Akan Mati Tanpa Karya”

“Ciptakan Karya Keemasan Bagi Zamanmu”

“Bergerak Untuk Kecerdasan Bangsa”

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Penyusun skripsi yang berjudul Pandangan Pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap Pelarangan Buku-buku Kri di Era Orde Baru menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 April 2013

Penyusun,

IRSAN
NIM.40400108025



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi ini Saudara **Irsan**, NIM: 40400108025, mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Pandangan Pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Terhadap Pelarangan Buku-buku Kiri di Era Orde Baru”, dan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 5 April 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Surayah Rasyid, M. Pd.
NIP. 19620910 199503 2 001

Muh. Quraisy Mathar, S.Sos., M.Hum
NIP. 19760316 200604 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Irsan
NIM : 40400108025
Judul : Pandangan Pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar Terhadap Pelarangan Buku-buku Kiri di Era Orde Baru.
Jurusan : Ilmu Perpustakaan

Samata, 5 April 2013

Penyusun

IRSAN

NIM 40400108025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Surayah Rasyid, M. Pd.

NIP. 19620910 199503 2 001

Muh. Quraisy Mathar, S.Sos., M.Hum

NIP. 19760316 200604 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan

Muh. Quraisy Mathar, Sos., M.Hum

NIP. 19760316 200604 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui oleh,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Mardan, M.Ag

NIP. 19591112 198903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Pandangan Pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Terhadap Pelarangan Buku-buku Kiri di Era Orde Baru yang disusun oleh Irsan, NIM : 40400108025, mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 15 April 2013 M, bertepatan dengan 5 Jumadil Awal 1434 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Adab dan Humaniora, Jurusan Ilmu Perpustakaan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 15 April 2013 M
5 Jumadi Awal 1434 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Dr. H. Barsihannor, M.Ag. (.....)
Sekretaris : Dra. Marwati, M.Ag. (.....)
Munaqisy I : Drs. M. Jayadi, M.Ag. (.....)
Munaqisy II : Hildawati Almah, S.Ag.,S.S., M.A. (.....)
Pembimbing I : Dra. Hj. Surayah, M.Pd. (.....)
Pembimbing II: Muh. Quraisy Mathar, S.Sos., M.Hum. (.....)

Diketahui oleh :

Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Mardan, M.Ag
NIP.19591112 198903 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Segala puji dihaturkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan sang revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat yang memberikan pencerahan sebagai penuntun kehidupan.

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Terhadap Pelarangan Buku-buku Kiri di Era Orde Baru” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan, Jurusan Ilmu perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moral maupun material. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para pembantu Rektor, dan seluruh Staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan maksimal kepada penulis.

2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, dan para Pembantu Dekan Fakultas Adab dan Humaniora.
3. Muh. Quraisy Mathar, S.Sos.,M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan sekaligus Pembimbing II dan Drs. Ahmad Muaafaq, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Perpustakaan.
4. Dra. Hj. Surayah, M.Pd selaku Pembimbing I, yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat, dan motivasi hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Para Penguji skripsi dan Dosen Jurusan Ilmu Perpustakaan serta dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, dengan segala jerih payah dan ketulusan, membimbing dan memandu perkuliahan, sehingga memperluas wawasan keilmuan penulis.
6. Para Staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Para pustakawan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang menjadi informan atau sumber data yang memberikan pandangannya kepada penulis untuk membuat skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda M. Rusdi Musba dan Ibunda Sumarni serta keluarga penulis haturkan penghargaan teristimewa dan ucapan terima kasih yang tulus, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta pengorbanan mengasuh, membimbing, dan mendidik, disertai doa yang

tulus kepada penulis. Juga kepada Kakak Rusni, S.Hum, dan adik-adik Herni M.R, Fitriani M.R, Ilham M.R, Ikram M.R, Risma M.R dan seluruh keluarga besar, yang selalu menjadi penghibur dan pemotivasi disela-sela penulis menuntut ilmu di kampus.

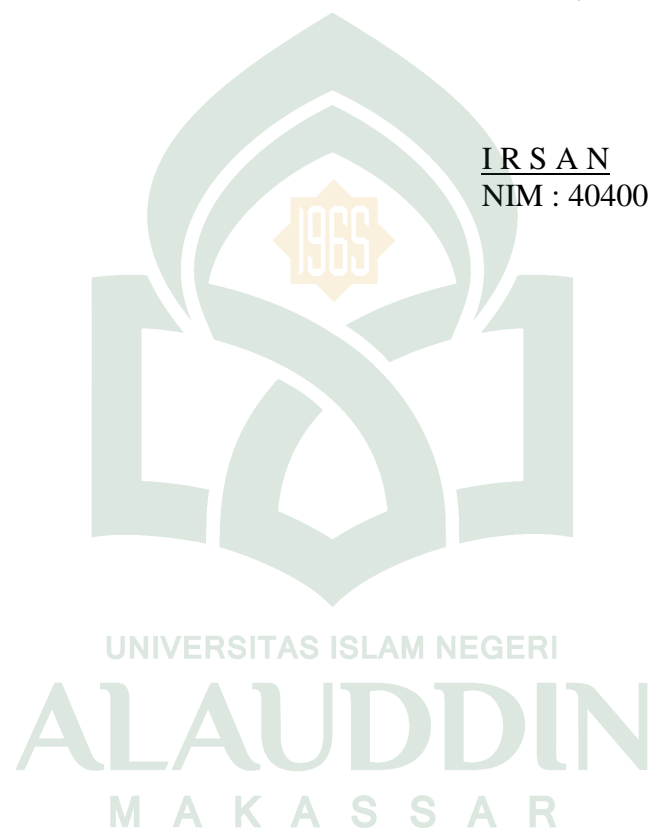
9. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Adab dan Humaniora Saudari Irma Ningsih Ridwan *IN spirit*, Saudara-saudara Muh. Kayyis B, Alfian Nur Rizki, Imran, Fajeruddin Syakir, Rahmat Yusuf adalah kawan-kawan angkatan yang masih berjuang dijalannya masing-masing, Senior Muh. Taufiq Syam S.Hum, Kanda Afdal, S.Hum, Zulkifli,S.Hum, Edi Aksa,S.Hum, Nur Ilham Achdar, S.Hum, yang juga masih berjuang demi masa depan masing-masing, dan adik-adik di fakultas Adab dan Humaniora yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa dan bimbingannya sekalian.
10. Himpunan Mahasiswa Islam yang senantiasa menjadikan spirit perjuangan insan cita selama berproses di organisasi, semangat Yakin Usaha Sampai selalu terpatri dihati sanubari penulis dalam menghadapi tantangan kehidupan.
11. Komunitas Seni Adab, BEM Fakultas Adab dan HMJ Ilmu Perpustakaan yang selalu menjadi tempat berkumpul dan berkarya serta keakraban yang tercipta, sebuah kenangan yang menjadi ingatan nanti dimasa tua bersama lika-liku yang pernah dijalani.

Akhirnya, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini kedepannya karena penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Amin

Makassar, 12 April 2013

Penulis,

IR S A N
NIM : 40400108025



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Ruang Lingkup Pembahasan dan Definisi Operasional | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi | 11 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Pustakawan | 13 |
| B. Pengertian Perpustakaan Perguruan Tinggi..... | 17 |
| C. Buku-buku kiri dan pelarangannya di era orde baru | 24 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 32 |
| B. Data dan Sumber Data..... | 34 |
| C. Instrumen Penelitian | 37 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 38 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Pandangan Pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar terhadap Buku-buku Kiri.....41
- B. Pandangan Pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar terhadap Pelarangan Buku-buku Kiri di era orde baru.....49

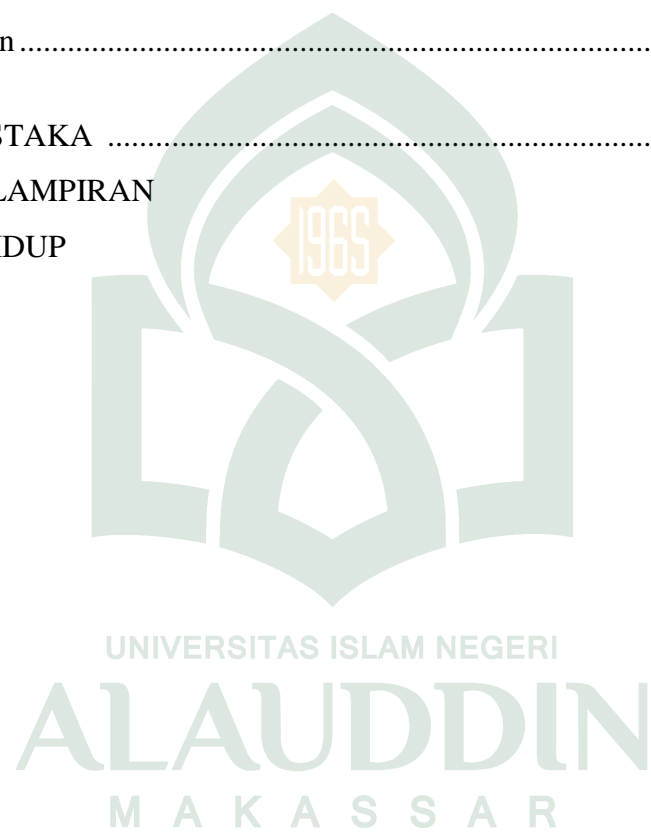
BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....56
- B. Saran.....57

DAFTAR PUSTAKA60

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Nama : Irsan
NIM : 40400108025
Judul : Pandangan Pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar Terhadap Pelarangan Buku-buku Kiri di Era Orde Baru

Penelitian ini membahas tentang pandangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap buku-buku kiri dan pelarangan buku-buku kiri di Era Orde Baru. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menemukan perspektif pustakawan tentang buku-buku kiri dan pelarangannya di era orde baru yang selama ini memiliki stigma yang kurang baik dari sebagian masyarakat. Penulis mengistilahkan buku-buku kiri sebagai sebuah bacaan yang mengajarkan paham komunisme, marxisme, dan leninisme, sebagaimana cap kiri selama ini diidentikkan kepada orang-orang Komunis atau pengikut ajaran Marx dan Lenin. Namun kemudian istilah buku kiri juga mencakup makna sebagai buku-buku yang kontroversial secara politik dan juga sebagai buku yang dimaknakan sebagai buku yang memuat gerakan sosial yang melawan arus yang dominan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang pandangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap pelarangan buku-buku kiri di era orde baru.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data digunakan metode wawancara, observasi dan kajian pustaka. Penelitian ini menghasilkan beberapa pandangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap buku-buku kiri dan pelarangan buku-buku kiri di era orde baru, yaitu bahwa dalam pemilihan koleksi buku, pustakawan UIN Alauddin Makassar tidak memiliki acuan yang tertulis baik dari pemerintah maupun internal perpustakaan sendiri sehingga tidak ada pembatasan dan kriteria koleksi yang diterapkan, kecuali buku-buku yang dianggap mengandung unsur SARA dan pornografi. Buku-buku kiri dalam perspektif pustakawan pada umumnya mengatakan bahwa buku bacaan yang politis. Kendati demikian, adapula perspektif yang mengatakan bahwa buku semacam ini adalah buku yang mengajarkan paham komunisme, marxisme, dan leninisme. Namun perspektif buku kiri menjadi luas maknanya dikalangan penulis dan penerbit buku, mereka mengistilahkan buku kiri adalah sebuah wacana yang melawan arus dominan dan memahami kiri dalam konteks Indonesia saat ini. Selain itu adanya pelarangan buku-buku kiri di era orde baru tidak lagi mempengaruhi perpustakaan dikarenakan saat ini merupakan era keterbukaan informasi, namun diakui bahwa dengan adanya pelarangan tersebut banyak informasi yang tidak bisa didapatkan akibat pembredelan dan pembakaran buku pada saat orde baru.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Buku merupakan kumpulan informasi yang menyingkap sejarah, penemuan pengetahuan yang dikemas dalam sebuah kompilasi kertas. Buku juga merupakan peradaban manusia sebab melalui informasi yang ada didalamnya kemudian dilestarikan secara terus menerus. Buku yang memuat karya intelektual manusia merupakan hasil dari realitas sosial yang kemudian di jadikan sebagai catatan untuk kelestarian informasi yang bersifat terbuka dan independen.

Buku pertama disebutkan lahir di Mesir pada tahun 2400-an SM setelah orang Mesir menciptakan kertas *papyrus*. Kertas *papyrus* yang berisi tulisan ini digulung dan gulungan tersebut merupakan bentuk buku yang pertama. Ada pula yang mengatakan buku sudah ada sejak zaman Sang Budha di Kamboja karena pada saat itu Sang Budha menuliskan wahyunya di atas daun dan kemudian membacanya berulang-ulang. Berabad-abad kemudian di Cina, para cendekiawan menuliskan ilmu-ilmunya di atas lidi yang diikatkan menjadi satu. Hal tersebut memengaruhi sistem penulisan di Cina di mana huruf-huruf Cina dituliskan secara vertikal yaitu dari atas ke bawah. ("Buku" 2012)

Buku yang terbuat dari kertas baru ada setelah Cina berhasil menciptakan kertas pada tahun 200-an SM dari bahan dasar bambu di ditemukan oleh Tsai Lun. Kertas membawa banyak perubahan pada dunia. Pedagang muslim membawa teknologi penciptaan kertas dari Cina ke Eropa pada awal abad 11 Masehi. Disinilah industri kertas bertambah maju. Apalagi dengan diciptakannya mesin

cetak oleh Gutenberg, perkembangan dan penyebaran buku mengalami revolusi. Kertas yang ringan dan dapat bertahan lama dikumpulkan menjadi satu dan terciptalah buku. (“Buku” 2012)

Di Indonesia orang menggunakan Lontar sebagai media untuk menulis, Lontar berasal dari jawa (*ron tal, artinya daun tal*), yaitu daun siwalan yang dikeringkan dan dipakai sebagai bahan untuk menulis naskah dan digunakan juga untuk kerajinan. Di Sulawesi Selatan lontar disebut *Lontara*. Konon lontara ini sudah sangat langka, didunia lontara tinggal tiga buah naskah saja. (“Lontar” 2012)

Perkembangan jumlah buku pada era globalisasi ini setiap tahunnya semakin bertambah seiring dengan melimpahnya informasi yang di jadikan sebagai catatan pengetahuan oleh penulis buku. Di Indonesia setiap bulan menurut Dharma Hutauruk (2011), Ketua Kompartemen Buku Ikapi, mengatakan saat ini buku yang diterbitkan 1.500-2.000 judul per bulan. Walaupun jumlah ini masih sangat kecil jika di kalkulasikan dengan total penduduknya yang terhitung 31 Desember 2010 mencapai 259.940.857 juta orang. (Ibokoe 2012)

Dalam mengembangkan penerbitan buku di Indonesia, diperlukan kerjasama bersama unsur-unsur perbukuan, seperti pengarang, pencetak, penerbit, penjual buku, pustakawan dan kalangan pendidikan yang dapat berbuat banyak untuk lebih meningkatkan peranan buku dalam masyarakat kita yang sedang membangun. Apalagi bila banyak kalangan menyatakan bahwa dalam hal perbukuan, kita masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Baik

dalam jumlah judul, tiras, mutu isi dan tata rupa, luas penyebaran dan pemanfaatan buku oleh masyarakat. (Koswara 1998, 55)

Salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia ketinggalan dari negara lain dalam penerbitan buku yaitu masih kurangnya penulis buku yang ada. Di sisi lain, penerbitan buku terkendala oleh biaya dan pajak penerbitan buku mulai dari kertas, percetakan, penjilidan, sampai pada proses penyaluran yang cukup mahal. Selain itu, faktor yang saat ini menjadi keluhan para penulis dan penerbit buku ialah dengan adanya pelarangan dan sensor buku-buku yang di anggap terlarang oleh pemerintah mulai sejak masa kolonialisme, orde lama, orde baru bahkan di era reformasi saat ini.

Adanya pelarangan buku terlarang untuk terbit di pasaran menjadi kendala yang sangat merugikan bagi penerbit dan penulis buku tertentu saat ini. Sejak masa kolonialisme atau pra kemerdekaan Indonesia sampai pada pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih terdengar adanya larangan, *sweeping*, bahkan pembakaran buku yang dianggap terlarang oleh pemerintah melalui Kejaksaan Agung dengan alasan melanggar ketertiban umum. Pelarangan itu menimbulkan pertanyaan, bahkan kritik oleh penerbit, penulis, mahasiswa dan kalangan yang menolak tindakan tersebut. Mereka mengkritik pemerintah sebab pelarangan buku adalah pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pelarangan buku oleh Kejaksaan Agung dikatakan merupakan penerapan UU 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang Yang Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat

(3), 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Iboekoe 2012)

Tentu dengan masih adanya pelarangan buku di era keterbukaan informasi sangat mencoreng Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia. Keberhasilan Indonesia menjadi negara demokratis di segani oleh banyak pihak dan dengan penuh kebanggaan negara memasuki fase reformasi demokratis kedua. Namun pada saat yang sama masih terjadi pelarangan, penyitaan, dan pembakaran buku di Indonesia. Betapa ironisnya, negara yang mengagungkan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan, kini menjadi tanda tanya berbagai pihak. Demokrasi yang dipahami selama ini oleh masyarakat Indonesia dengan segala kemerdekaan berbicara dan berpendapat baik lisan maupun tulisan ternyata hanya menjadi kebebasan bagi segelintir orang.

Pada tanggal 14 April 2010 Jaksa Agung Muda Intelijen Mohammad Amari menguraikan sepuluh kriteria buku yang dianggap mengganggu ketertiban dan dapat menyebabkan peredarannya dilarang yaitu pertama adalah barang cetakan yang berisi tulisan, gambar, atau lukisan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, atau yang sekarang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ketiga, mengandung dan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Keempat, merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula buku yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan. Kriteria berikutnya ialah merusak akhlak dan memajukan pornografi dan pencabulan. Ketujuh,

memberikan kesan anti Tuhan, anti agama, dan penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia, sehingga merupakan penodaan dan perusak kerukunan hidup beragama. Kedelapan, merugikan dan merusak pelaksanaan program pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Kesembilan, mempertentangkan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Terakhir ialah hal lainnya yang dianggap dapat pula mengganggu ketertiban umum (Iboekoe 2012).

Banyak diantara buku-buku yang mengandung dan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme di *sweeping* bahkan buku-buku tersebut dilarang beredar di pasaran pada masa orde baru dan masih terdapat pelarangan buku kiri hingga pada era reformasi. Larangan tersebut sebagai antisipasi pemerintah terhadap pengaruh bacaan buku-buku kiri di Indonesia. Tidak hanya di toko-toko buku yang dilarang peredarannya bahkan di perpustakaan-perpustakaan baik perpustakaan umum maupun perpustakaan perguruan tinggi. Padahal di era globalisasi informasi ini, masyarakat bebas mengakses informasi apapun dan dimanapun demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Buku-buku yang dianggap kiri selama ini merupakan karya intelektual dari tokoh-tokoh penulis kalangan yang dianggap kiri seperti Pramudya Ananta Toer, Tan Malaka, serta tokoh-tokoh kekirian yang dianggap menyebarkan paham komunisme, leninisme dan marxisme. Mereka dituduh oleh pemerintah yang berkuasa pada masa orde baru dan reformasi saat ini sebagai propaganda kemunculan kembali paham-paham komunisme. Di dunia pendidikan pun melarang peredaran buku-buku kiri masuk sebagai referensi bahan ajaran siswa

sehingga dipergustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi jarang kita menemukan buku kiri karena dianggap mempengaruhi pola pikir pelajar dan mahasiswa dalam bertindak. Tak jarang pemerintah menganggap bahwa mahasiswa-mahasiswa kritis dan “pemberontak” dengan ideologi hasil bacaan buku-buku kiri dianggap sebagai mahasiswa kiri yang mengkonsumsi bacaan buku-buku kiri.

Wacana-wacana “kiri” pernah mendapat tempat tersendiri dalam kajian sejarah Indonesia, Namun, tekanan politik yang bertubi-tubi dilancarkan rezim Orde Baru, membuat wacana kiri (atau kekiri-kirian) menjadi sesuatu yang haram untuk dijamah. Itu dilakukan oleh rezim dengan cara yang amat rapi dan sistematis. Salah satu lewat stigma bahwa “kiri” itu pengganggu perusuh dan ancaman bagi “stabilitas nasional”. (Munasichin 2005, vii)

Fenomena pelarangan buku kiri yang paling lama dan paling banyak melarang buku adalah pada masa orde baru. Orde baru yang kekuasaannya sangat otoriter, dimana pada rezim ini komunisme menjadi musuh utama. Buku-buku yang dianggap mengajarkan komunisme, marxisme, leninisme diberangus dengan alasan-alasan yang tertentu. Selama pemerintahan orde baru ratusan buku dan famplet dilarang bersedar. Sebagian penulisnya ditahan dengan subversif. Alasan kejaksaaan agung melarang peredaran buku-buku tersebut karena memuat ajaran komunisme, menodai agama, memuat pornografi, menghina kepala Negara, memuat aksara Cina dan lain-lain.

Dari uraian pelarangan peredaran buku-buku kiri di era orde baru yang begitu santer dan sangat banyak daftar karya yang disita yang dianggap terlarang,

baik ditoko-toko buku maupun diperpustakaan, maka penulis fokus melakukan penelitian pada pandangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap buku-buku kiri dan pelarangan buku-buku kiri di era orde baru. Meskipun di beberapa masa pemerintahan rezim yang berkuasa melakukan pelarangan buku namun yang paling menyita perhatian penulis adalah rezim orde baru dengan pelarangan buku kiri yang begitu banyak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana pandangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap buku-buku kiri ?
2. Bagaimana pandangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap pelarangan buku-buku kiri di era Orde Baru ?

C. Ruang Lingkup Pembahasan dan Definisi Operasional

1. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ini, yang di jadikan fokus penelitian mengenai ruang lingkup (*scope*) pengkajian secara spesifik dapat dipaparkan dalam dua bagian sebagai berikut:

- a. Pandangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap buku-buku kiri.

- b. Pandangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap pelarangan buku-buku kiri di era Orde Baru.

2. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menganggap perlu menjabarkan definisi secara operasional dari beberapa kata dan istilah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut “Pandangan Pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Terhadap Pelarangan Buku-Buku Kiri Di Era Orde Baru”. Dalam Penelitian ini variabel yang di gunakan 2, yaitu Pustakawan dan Buku Kiri.

Secara operasional, variabel-variabel tersebut dapat didefenisikan sebagai berikut :

- a. Pustakawan merupakan orang yang bekerja di perpustakaan yang bertugas menata, mengolah, menyebarluaskan bahan pustaka atau informasi yang pernah mengikuti jenjang pendidikan perpustakaan dan atau pernah mengikuti pelatihan kepustakawanan. Pustakawan perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan lembaga unit dari universitas yang berfungsi sebagai tempat mahasiswa melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam menunjang kebutuhan akademik mahasiswa. Dalam sebuah perpustakaan perguruan tinggi terdapat koleksi yang beraneka ragam, tentu pemilihan sebuah buku untuk dikoleksi di perpustakaan bergantung pada kriteria yang dijadikan

sebagai acuan, namun proses pemilihan juga perlu dititik beratkan pada pandangan pustakawan yang ada didalam perpustakaan tersebut. Untuk mengetahui alasan-alasan pemilihan koleksi perpustakaan, pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar memberikan pandangannya terhadap buku-buku kiri dan pelarangan buku-buku kiri di era orde baru.

- b. Buku Kiri dalam lingkup Negara Indonesia dikatakan sebagai buku yang dianggap mengajarkan dan menyebarkan serta pandangan yang mengacu dengan paham komunisme, sosialisme, leninisme dan marxisme atau sesuatu yang anti-kemapanan (defenisi yang melekat pada orde baru). Buku kiri juga dianggap sebagai buku kiri jika penulis yang dianggap kiri menerbitkan buku meskipun muatan isi buku tersebut tidak menjelaskan paham komunisme, sosialisme, leninisme dan marxisme.

Istilah buku-buku kiri merupakan istilah umum yang digunakan untuk menyebut buku-buku yang memuat atau membahas pemikiran yang termasuk dalam spektrum ideologi Marxisme dan atau Sosialisme, mulai dari kutub ortodoks hingga populis kiri (Subhan 2008, 16).

Pada awalnya penyebutan istilah buku-buku itu disebut juga dengan *literatuur socialistisch* pada zaman kolonialisme dalam kurun waktu 1920-1926 yang membanjiri “bacaan-bacaan liar”.

Pada zaman kolonialisme buku-buku tersebut itu istilah bacaan liar (Razif 2005, 2).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan dan kegunaannya, adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap buku-buku kiri.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap pelarangan buku-buku kiri di era orde baru.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan ilmiah dari penelitian atau skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu pada jurusan Ilmu Perpustakaan fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selain itu, kegunaan ilmiah dari penelitian ini dapat menjadi masukan buat pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jika terdapat informasi yang dianggap penting.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh elemen yang ingin mengetahui bagaimana pandangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap buku-buku kiri dan pelarangan

buku-buku kiri di Indonesia pada masa era orde baru. Sehingga informasi yang di kemukakan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi para penulis, penerbit, mahasiswa pada umumnya dan khususnya penulis yang senantiasa melahirkan karya tulis dalam bentuk buku maupun karya tulis dalam bentuk lainnya.

E. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Untuk memperoleh gambaran sistematis keseluruhan isi dalam skripsi ini, maka penulis memaparkan garis-garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan diakhiri dengan garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua terbagi kedalam dua cakupan. pertama, tinjauan pustaka yang membahas tentang penelitian yang memiliki kesamaan topik yang dengan penelitian ini sehingga. Kedua

Bab ketiga merupakan bab yang memuat tentang metodologi penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian, sumber data, instrumen penelitian, metode pengumpulan datanya, teknik pengolahan data, teknik analisa datanya serta hasil penelitian.

Bab keempat merupakan bab yang berisi hasil Penelitian dan analisa yang terbagi dua subbab. Pertama, tentang pandangan pustakawan Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap buku-buku kiri. Kedua, pandangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap pelarangan buku-buku kiri di era orde baru.

Bab kelima ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta diakhiri dengan daftar pustaka.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Pengertian Pustakawan*

Pustakawan adalah orang yang bekerja di perpustakaan yang mengelolah dan melayani pemustaka dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Sedangkan dalam istilah asing *librarianships* diartikan sebagai *a profession concerned with acquiring and organizing collections of books and related materials in libraries and servicing readers and others with these resources; the position or duties of a librarian* (Iperpin 2013).

Pustakawan juga bisa di artikan sebagai orang yang melakukan aktivitas di perpustakaan dengan cara memberikan pelayanan kepada pemustaka sesuai dengan aturan teknis pelaksanaannya berdasarkan ilmu perpustakaan, arsip, dokumentasi, informasi yang dimilikinya melalui pendidikan perpustakaan.

Pengertian lain tentang Pustakawan adalah orang yang bergerak di bidang perpustakaan atau ahli perpustakaan. Menurut kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia dikatakan bahwa yang disebut pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimiliki melalui pendidikan. Sedangkan menurut kamus istilah perpustakaan karangan Lasa, HS (1994) Librarian-pustakawan, penyaji informasi adalah Tenaga profesional dan fungsional dibidang perpustakaan, informasi maupun dokumentasi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa orang yang memiliki pendidikan perpustakaan atau ahli perpustakaan atau tenaga profesional dibidang perpustakaan dan bekerja di perpustakaan. Jadi pustakawan adalah seseorang yang profesional atau ahli dalam bidang perpustakaan.

Poerwadarminta dalam Aziz (2006: 44) menambahkan bahwa, pustakawan adalah ahli perpustakaan. Dengan pengertian tersebut berarti pustakawan sebagai tenaga yang berkompeten dibidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Selanjutnya Aziz (2006: 44) menambahkan bahwa, pustakawan merupakan tenaga profesi dalam bidang informasi, khususnya informasi publik, informasi yang disediakan merupakan informasi publik melalui lembaga kepustakawanan yang meliputi berbagai jenis perpustakaan”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pustakawan merupakan tenaga profesi dalam bidang informasi, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Dalam konferensi IFLA di New Delhi pada 24 – 28 Agustus 1992 bisa dijelaskan bahwa kepustakawanan secara lebih luas diartikan :

1. Pustakawan bekerja berdasarkan etos-etos kemanusiaan, *humanistic ethos* yang dianggap sebagai elan kepustakawanan, sebagai lawan dari kegiatan pertukangan.
2. Pustakawan sebagai fasilitator kelancaran arus informasi dan pelindung hak asasi manusia dalam akses ke informasi.

Pustakawan memperlancar proses transformasi dari informasi dan pengetahuan menjadi kecerdasan sosial atau *social intelligence*. (Iperpin 2013)

Dari penjelasan diatas maka dapat secara sederhana pustakawan adalah orang yang memiliki kompetensi untuk bekerja di perpustakaan serta pustakawan memiliki tanggungjawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pelayanan informasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 ayat 8 yang dimaksud pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur paling penting dalam menghadapi persaingan kerja di era globalisasi. Sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan tersingkir dan digantikan oleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Salah satu masalah dalam pengertian kompetensi adalah kata itu sendiri. Masalahnya adalah bahwa pada kenyataannya dalam bahasa biasa kompetensi memiliki implikasi yang tidak terlalu umum. Kata tersebut selalu dikaitkan dengan arti “harus berkualitas”, sehingga jika ada orang yang tidak berkualitas, maka dianggap orang tersebut tidak kompeten (tidak mampu, tidak cakap). Sebaliknya jika ada orang yang berkualitas, dianggap memiliki kompetensi yang

tinggi. Subyek kompetensi mengakibatkan munculnya banyak definisi alternatif mengenai kompetensi dan sejumlah pandangan yang berbeda mengenai konsep serta pengaplikasiannya.

Kompetensi ialah suatu karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu (Marshall 2003, 39). Selain itu, kompetensi diartikan sebagai tolak ukur guna mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan dan skill atau kemampuannya (Rumani 2008, 16).

Dari kedua definisi di atas dapat diketahui bahwa kompetensi adalah kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan dan kinerja yang unggul untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penjelasan di atas serupa dengan pernyataan Mirabile dalam Dewiyana (2006: 24) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu pengetahuan, keterampilan, kemampuan atau hal-hal yang berhubungan dengan kinerja yang tinggi dalam pekerjaan, seperti penyelesaian masalah, pemikiran analitik, atau kepemimpinan.

Sedangkan menurut Aspey dalam Dewiyana (2006: 24) pengertian kompetensi tidak hanya meliputi penguasaan keterampilan dan pengetahuan saja, tetapi juga termasuk penguasaan terhadap tugas dan motivasi dalam menjalankan tugas tersebut. Aspey juga mendefinisikan orang yang berkompeten sebagai seseorang yang menguasai pekerjaannya dan memiliki motivasi, keterampilan, serta pengetahuan, dan secara konsisten menjalankan tanggung jawab tersebut.

B. Pengertian Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan merupakan tempat belajar masyarakat yang tidak memungut biaya dan tanpa membedakan identitas masyarakat tertentu. Perpustakaan menjadi sangat penting dalam sebuah tatanan masyarakat karena peranannya hadir untuk mengembangkan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa perpustakaan masyarakat tidak dapat berkembang. Sama halnya perpustakaan tidak dapat bermanfaat ketika tidak ada masyarakat.

Perpustakaan sebagai salah satu pusat sumber informasi dan pengetahuan yang dikumpulkan dan disimpan di rak-rak buku yang pada umumnya disusun dengan klasifikasi penomoran dan menggunakan catalog untuk kemudahan penelusuran bagi pemustaka. Perpustakaan juga merupakan wadah rekreasi dan inspirasi bagi masyarakat dalam memanfaatkan waktu senggang masyarakat. Beberapa jenis perpustakaan diantaranya Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Swasta, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis hanya akan menjelaskan gambaran singkat tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi yang terkait lokasi kajian penelitian.

Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah sebagai wadah untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan bagi sivitas akademika perguruan tinggi atau universitas. Sebagai unsur penunjang perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misinya, perpustakaan perguruan tinggi memiliki tujuan, menurut Basuki (1992: 52) tujuan perpustakaan perguruan tinggi adalah:

1. Memenuhi keperluan informasi masyarakat perguruan tinggi , lazimnya staf pengajar dan mahasiswa. Sering pula mencakup tenaga kerja administrasi perguruan tinggi.
2. Menyediakan bahan pustaka (referensi) pada semua tingkatan akademis, artinya mulai dari mahasiswa tahun pertama hingga ke mahasiswa pasca sarjana dan pengajar.
3. Menyediakan ruangan belajar bagi pemakai perpustakaan.
4. Menyediakan jasa peminjaman yang tepat guna bagi berbagai jenis pemakai.
5. Menyediakan jasa informasi aktif yang tidak saja terbatas pada lingkungan perguruan tinggi juga lembaga industri lokal.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi merupakan lembaga yang membantu perguruan tinggi dalam mewujudkan salah satu visi dan misinya yaitu memberikan pendidikan dan secara umum memfasilitasi mahasiswa atau sivitas akademika untuk dalam melakukan penelitian. Untuk terwujudnya tujuan tersebut, perpustakaan perguruan tinggi harus menjalankan fungsinya dengan baik.

Adapun fungsi perpustakaan perguruan tinggi menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2004: 3) adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Edukasi Perpustakaan merupakan sumber belajar para sivitas akademika, oleh karena itu koleksi yang disediakan adalah koleksi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, pengorganisasian bahan

pembelajaran setiap program studi, koleksi tentang strategi belajar mengajar dan materi pendukung pelaksanaan evaluasi pembelajaran.

2. Fungsi Informasi Perpustakaan merupakan sumber informasi yang mudah diakses oleh pencari dan pengguna informasi.
3. Fungsi Riset Perpustakaan mempersembahkan bahan-bahan primer dan sekunder yang paling mutakhir sebagai bahan untuk melakukan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Koleksi pendukung penelitian di perpustakaan perguruan tinggi adalah menghasilkan karya-karya penelitian yang dapat di aplikasikan untuk kepentingan pembangunan masyarakat dalam berbagai bidang.
4. Fungsi Rekreasi, Perpustakaan harus menyediakan koleksi rekreatif yang bermakna untuk membangun dan mengembangkan kreativitas, minat dan daya inovasi pengguna perpustakaan.
5. Fungsi Publikasi Perpustakaan selayaknya juga membantu melakukan publikasi karya yang dihasilkan oleh warga perguruan tingginya yakni sivitas akademika dan staf non-akademik.
6. Fungsi Deposit Perpustakaan menjadi pusat deposit untuk seluruh karya dan pengetahuan yang dihasilkan oleh warga perguruan tingginya.
7. Fungsi Interpretasi Perpustakaan sudah seharusnya melakukan kajian dan memberikan nilai tambah terhadap sumber-sumber informasi yang dimilikinya untuk membantu pengguna dalam melakukan dharmanya.

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa perpustakaan perguruan tinggi dengan fungsinya dapat mendukung program pendidikan,

pengajaran, serta penelitian dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi. Dalam melaksanakan tujuannya, perpustakaan perguruan tinggi juga menjalankan fungsinya yaitu fungsi edukasi, fungsi informasi, fungsi riset, fungsi rekreasi, fungsi publikasi, fungsi deposit, dan fungsi interpretasi.

Kerja Pustakawan dalam perpustakaan perguruan tinggi menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/MPAN/12/2002 dan Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 23 Tahun 2003 dan Nomor: 21 Tahun 2003 serta Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2004, meliputi bidang pendidikan, bidang pengorganisasian dan pendayagunaan bahan pustaka, masyarakatan, pengkajian pengembangan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang lainnya (Subrata 2009).

Dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi aktivitas tersebut dapat diperoleh gambaran kegiatan yang dapat dilakukan di perpustakaan, khususnya perpustakaan perguruan tinggi demi mengoptimalkan pelayanan perpustakaan kepada civitas akademika dan masyarakat pengguna lainnya.

Pelayanan merupakan unsur utama dalam pencapaian suatu keberhasilan organisasi perpustakaan disebabkan bagian inilah yang berhubungan langsung dengan pengguna dalam penyebaran informasi serta pemanfaatan jasa dan fasilitas yang ada di perpustakaan. Banyak argumentasi yang menyatakan bahwa layanan perpustakaan merupakan titik sentral

kegiatan perpustakaan. Dengan kata lain, perpustakaan identik dengan layanan karena tidak ada perpustakaan jika tidak ada kegiatan layanan.

Menurut Lasa (1994: 122), pelayanan perpustakaan mencakup semua kegiatan pelayanan kepada pengguna yang berkaitan dengan pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat guna dan tepat waktu untuk kepentingan pengguna perpustakaan. Kegiatan pelayanan kepada pengguna perpustakaan merupakan pelayanan yang diberikan oleh suatu perpustakaan untuk menyebarkan informasi dan pemanfaatan koleksi. Pengguna perpustakaan tidak hanya menginginkan pelayanan yang diberikan pihak perpustakaan saja, tetapi juga menginginkan pelayanan tersebut dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Sejalan dengan pendapat di atas, Rahayuningsih (2007: 85), menyatakan pelayanan perpustakaan merupakan kegiatan memberikan layanan informasi kepada pengguna perpustakaan dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar:

1. Pelayanan bersifat universal, layanan tidak hanya diberikan kepada individu-individu tertentu, tetapi diberikan kepada pengguna secara umum
2. Pelayanan berorientasi pada pengguna, dalam arti untuk kepentingan para pengguna, bukan kepentingan pengelola.
3. Menggunakan disiplin, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam memanfaatkan perpustakaan.
4. Sistem yang dikembangkan mudah, cepat, dan tepat.

Selain itu setiap tahunnya, seperti halnya perpustakaan yang lain, perpustakaan perguruan tinggi melakukan seleksi bahan pustaka dalam mengembangkan koleksi sesuai kebutuhan mahasiswa atau kebutuhan kurikulum.

Menurut Septiyantono dan Sidik dalam Subhan (2008, 9-10), secara umum terdapat tiga prinsip seleksi yang umumnya dianut oleh perpustakaan, yakni:

1. Pandangan Tradisional.

Prinsip ini mengutamakan nilai intrinsik untuk bahan pustaka yang akan dikoleksi perpustakaan. Titik tolak yang mendasari prinsip ini ialah pemahaman bahwa perpustakaan merupakan tempat untuk melestarikan warisan budaya dan sarana untuk mencerdaskan masyarakat. Apabila dinilai tidak bermutu, bahan pustaka tidak akan dipilih untuk diadakan.

2. Pandangan Liberal

Prioritas didasarkan atas popularitas. Artinya, kualitas tetap diperhatikan, tetapi dengan lebih mengutamakan pemilihan karena disukai dan banyak dibaca atau mengikuti selera masyarakat pemakai.

3. Pandangan Pluralistik.

Prinsip yang dianut pandangan ini berusaha mencari keselarasan dan keseimbangan di antara kedua pandangan tersebut, baik tradisional maupun liberal.

C. *Buku-Buku Kiri dan Pelarangannya Di Orde Baru*

Kata “kiri” sudah lama sekali menjadi sesuatu yang angker sekaligus amat sexy di negeri ini, tapi diam-diam juga dibenci. Istilah “kiri” biasanya mengacu pada sesuatu yang berkaitan dengan komunisme, sosialisme dan marxisme (walaupun ketiga hal itu tentu saja berbeda satu sama lain) atau sesuatu yang anti-kemapanan. (Kurnia 2009)

Subhan (2008: 16) dalam skripsinya menjelaskan bahwa istilah buku-buku kiri merupakan istilah umum yang digunakan untuk menyebut buku-buku yang memuat atau membahas pemikiran yang termasuk dalam spektrum ideologi Marxisme dan atau Sosialisme, mulai dari kutub ortodoks hingga populis kiri. Bila ditelusur sejarahnya, istilah pertama yang digunakan untuk menyebut buku-buku tersebut ialah *literatuur socialistisch*. Buku-buku tersebut, pada era kolonialisme Belanda, diberi label sebagai bacaan liar.

Pada Kongres IV tahun 1924 di Batavia, PKI mendirikan *Kommissi Batjaan Hoofdebestuur PKI*. Bentuk ini berhasil menerbitkan dan menyebarkan tulisan-tulisan *literatuur socialistisch*, orang yang pertama kali memperkenalkan istilah tersebut ialah Semaoen yang juga menjelaskan istilah tersebut sebagai sebuah ilmu yang mengajarkan tentang pergaulan hidup tanpa memeras satu sama lain (Razif 2005, 2).

Di masa Orde Baru, pelarangan buku mengambil bentuk yang sistematis akibat tersedianya argumen ideologis dan keperluan mempertahankan sebuah versi “kebenaran” politis. Orde Baru dan kekuasaan Soeharto berdiri di atas

sebuah misteri tragedi pembunuhan massal terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota dan simpatisan PKI. Kenyataan ini menjadi landasan bagi kebijakan pelarangan terhadap hampir seluruh buku-buku dari mereka yang diasosiasikan kiri (Robet 2010).

Robertus Robet menggunakan istilah untuk ‘pembunuhan terhadap buku’ yaitu librisida. Istilah librisida diterjemahkan Robertus Robet dari konsep *Libricide* yang bersumber dari Rebecca Knuth. Di dalam Knuth, librisida menunjukkan adanya suatu praktik yang sistematis dari suatu rezim terhadap buku yang dilakukan dengan maksud pencapaian suatu tujuan-tujuan ideologi jangka pendek maupun jangka panjang. Librisida juga mengindikasikan adanya kelompok di dalam masyarakat yang hendak mendominasi negara dan memiliki gagasan ekstrim mengenai masyarakat (Knuth 2003, viii).

Sejak komunisme diberangus oleh rezim Orde Baru dan terus-menerus dijadikan the invisible enemy—musuh tak kasat mata, bahaya laten dan sebagainya—diam-diam “cap kiri” juga mengalami sofistikasi menjadi sesuatu yang cenderung dihindari sekaligus bikin penasaran. (Kurnia 2009)

Pelarangan buku-buku kiri memang paling menyita perhatian adalah pada masa orde baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia, sejarah mencatat bahwa era orde barulah yang paling banyak melarang buku-buku kiri. Dimulai setelah peristiwa Gerakan 30 September, dimana tiga bulan setelah peristiwa tersebut terjadi, Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Bidang Teknis Pendidikan, Drs. K. Setiadi Kartohadikusumo, menyatakan 70 judul buku

dianggap terlarang, pada saat itu tepat pada 30 November 1965. Praktis dengan adanya pelarangan tersebut, selanjutnya semua karya 87 penulis yang dituduh beraliran kiri juga ikut dilarang (Yusuf 2010, 4).

Kerja sama informal antara Jaksa Agung dan lembaga-lembaga (militer) lainnya baru diformalkan pada Oktober 1989 ketika Kejaksaan Agung membentuk Clearing House yang berfungsi meneliti isi sebuah buku dan memberi rekomendasi langsung kepada Jaksa Agung (Yusuf 2010. 50).

Selain Kejaksaan, lembaga pemerintah yang juga melarang buku adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI no. 1381/1965 tentang Larangan Mempergunakan Buku-buku Pelajaran, Perpustakaan dan Kebudayaan yang Dikarang oleh Oknum-oknum dan Anggota-anggota Ormas/Orpol yang Dibekukan Sementara Waktu Kegiatannya, disertai dengan dua buah lampiran. Lampiran pertama berisi 11 daftar buku pelajaran yang dilarang pemakaiannya, antara lain buku-buku karya Soepardo SH, Pramoedya Ananta Toer, Utuy T. Sontani, Rivai Apin, Rukiyah, dan Panitia Penyusun Lagu Sekolah Jawatan Kebudayaan. Lampiran kedua berisi 52 buku karya penulis-penulis Lekra yang harus dibekukan seperti Sobron Aidit, Jubar Ayub, Klara Akustian/A.S Dharta, Hr. Bandaharo, Hadi, Hadi Sumodanokusumo, Riyono Pratikto, F.L Risakota, Rukiah, Rumambi, Bakri Siregar, Sugiati Siswadi, Sobsi, Utuy Tatang. S, Pramoedya Ananta Toer, Agam Wispi, dan Zubir A.A. (Yusuf 2010, 51)

Selain Departemen P&K, Menteri Perdagangan dan Koperasi juga mengeluarkan Keputusan Menteri No. 286/ KP/ XII/ 78 yang diturunkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 01/ DAGLU/ KP/ III/ 79 yang melarang impor, perdagangan, dan pengedaran segala jenis barang cetakan dalam huruf/aksara dan bahasa Cina. Pada masa itu, pemerintah Cina yang berideologi komunisme dianggap berbahaya dan mengimpor barang cetakannya dapat membuka kesempatan untuk menyebarkan ideologi tersebut. Larangan ini membuat pengecualian untuk barang cetakan yang bersifat ilmiah. Namun, barang-barang tersebut harus memperoleh persetujuan dari Departemen P&K, izin beredar dari Kejaksaan Agung, dan importir pelaksana harus memiliki TAPPI(S) serta ditunjuk oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi setelah mendengar pendapat Kejaksaan Agung. (Yusuf 2010, 52).

Dalam praktiknya, selain menyita buku, pemerintah juga menyita dan memusnahkan kaset dan CD lagu mandarin dan yang memuat beraksara Cina. Tindakan pelarangan ini selain berkaitan dengan pemutusan hubungan dengan Cina, juga terkait dengan politik diskriminasi warga Tionghoa di dalam negeri. Tak hanya pelarangan, tindakan represif pada masa Orde Baru juga diikuti dengan penyitaan buku secara paksa dan bahkan penangkapan dan pengadilan bagi mereka yang terkait dengan buku tersebut. Pengadilan atas Bambang Subono, Bonar Tigor Naipospos, dan Bambang Isti Nugroho di Yogyakarta pada 1989 memaksa mereka harus mendekam di penjara selama lebih dari empat tahun karena kedapatan membawa buku sastra Rumah Kaca karya Pramoedya Ananta Toer (Yusuf 2010, 52-53).

Penghangusan gagasan menantang mereka yang berseberangan bahwa pelarangan buku adalah tindakan paripurna, tak bisa dicabut apapun situasi politik dan seberapapun tinggi tingkat kecerdasan masyarakat. Ini lebih dari yang diatur dalam PNPS Nomor 4/1963. Ketika publik mengecam betapa tidak beradabnya pembakaran buku, Jaksa Agung segera membuatnya tampak 'beradab'. Teknologi daur ulang, ikon generasi ketiga gerakan hak asasi manusia dengan ide pembangunan berkelanjutan dan penyelamatan lingkungan, menjalankan perintah mendaur. Para wartawan kembali diundang bukan untuk melihat tumpukan abu sisa bakar melainkan bubur kertas. Tak ada pasalnya penulis atau penerbit punya hak membela diri. Entah buku Yoshihara Kunio, "Kapitalisme Semu di Asia Tenggara" atau Harry Poeze tentang Tan Malaka, Jaksa Agung telah menjadikannya bubur kertas (Putri 2010).

Demokrasi pasca Orde Baru belum mengubah hubungan negara dan masyarakat. Keberagaman budaya dan kecerdasan pikiran belum jadi sumber kekuatan politik bangsa. Kita pun masih mendaur ulang kebijakan kolonial. Dari haatzaai artikelen dalam wetboekvan Strafrecht, persbreidelordonnantie, staat van oorlog en beleg ordonnantie menjadi KUHP, PNPS No 4 tahun 1963 dan menjadi UU No 4/PNPS/1963. Demokrasi ini bertabur pujian dari berbagai belahan dunia seme ntara pengendalian pikiran selangkah demi selangkah dilakukan (Putri 2010).

Agak aneh karena pelarangan buku dilakukan bukan karena isinya yang mengandung informasi yang dinilai tak layak untuk dibaca akan tetapi karena

alasan yang politis yang memojokkan penulis, editor, dan penerbit. Bukan hanya itu, keputusan dimusnahkannya karya 21 penulis di ruang Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sangat memprihatinkan. Tidak diketahui berapa secara pasti buku yang dianggap terlarang namun diperkirakan sekitar 500 judul buku yang dicap terlarang dimasa itu (Yusuf 2010, 4).

Insiden pelarangan dan pemusnahan terhadap buku-buku kiri yang dilakukan oleh rezim orde baru menandakan adanya dugaan kebijakan politis, seperti apa yang ditelah digambarkan oleh Robertus Robet diatas, bahwa “pembunuhan terhadap buku” terdapat alasan politis yang hendak mendominasi kekuasaan dan menolak gagasan kiri karena dianggap sebagai pemikiran yang membahayakan masyarakat.

Buku-buku kiri pada rezim orde baru dianggap sebagai pengganggu atau ancaman stabilitas nasional karena mengajarkan ajaran Marxisme, Sosialisme, Komunisme yang ketiga wacana tersebut sangat dilarang dan dijadikan sebagai sesuatu yang haram untuk diikuti. Lahirnya ketiga ajaran tersebut tidak lepas dari Filsuf asal Jerman yang sangat dikenal yaitu Karl Marx yang kemudian pemikirannya menjadi sebuah ideologi yang diistilahkan Marxisme. Selama masa rezim Orde Baru wacana tentang kiri (atau kekiri-kirian) di stigmakan sebagai sebuah ideologi yang menakutkan sehingga terjadi tekanan politik yang dialami oleh para pemikir-pemikir kiri.

Sehingga bisa diperkirakan sangat jarang ditemukan buku-buku kiri pada saat itu, apalagi perjualbelikan secara bebas. Dengan demikian pelarangan peredaran buku-buku kiri juga memiliki dampak instansi-instansi tertentu

khususnya perpustakaan. Sehingga perpustakaan sebagai tempat menyimpan, mengoleksi dan melayani buku juga dilarang oleh rezim orde baru dalam memfasilitasi buku-buku kiri kepada pemustaka pada saat itu.

Di perpustakaan perguruan tinggi sendiri, penulis juga menduga terjadi pembatasan koleksi, dimana perpustakaan perguruan tinggi merupakan instansi pemerintahan yang juga mengikuti aturan pemerintah dalam melarang buku-buku tertentu melalui penerapan UU 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang Yang Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Analisa penulis dikuatkan oleh Sulistyio Basuki, bahwa pemilihan buku berarti juga proses menolak buku tertentu. Ada beberapa alasan terjadinya penolakan atau tidak memilih buku untuk dijadikan koleksi suatu perpustakaan, salah satunya ialah karena adanya pelarangan atas suatu buku (Basuki 1992, 426). Sulistyio Basuki (1992:115) mencatat, secara umum ada lima sebab mengapa buku dilarang beredar di Indonesia, yakni: 1) alasan politik; 2) alasan agama; 3) alasan ras; 4) alasan pornografi; dan 5) alasan penerbitan dalam aksara asing. Fokus penelitian ini, peneliti lebih merujuk pada alasan pertama, yaitu alasan politik dalam melarang buku-buku kiri.

Wahyu Winarmo salah seorang staf redaksi yang bergelut di penerbitan buku kiri yang masih tetap eksis sampai saat ini yaitu Resist Book, dia mengungkapkan bahwa kalau orang memahami kiri itu komunis mungkin akan sedikit yang mau membaca, tapi kiri itu kita memhami sebagai bagian dari gerakan sosial “melawan arus yang selama ini yang dominan”. Salah seorang penulis kiri yang aktif menulis tentang wacana kiri saat ini yaitu Eko Prasetyo yang dalam 10 tahun terakhir ada 30 judul buku yang ditulisnya dan hampir

semuanya diterbitkan di Resist Book. Dia mengungkapkan bahwa ideologi kiri tidak akan mati dimakan zaman. Diakui bahwa di era 1990-an gagasan tentang gerakan kiri punya andil dalam membawa Indonesia ke era reformasi. Saat itu gerakan mahasiswa yang menumbangkan era orde baru banyak di ilhami wacana kiri, salah satunya melalui buku-buku kiri yang beredar di Indonesia. (Rizalino 2012)



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini di gunakan metode yang menjadi acuan untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan pengetahuan baru. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

A. *Jenis Penelitian*

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana pandangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang buku kiri dan pelarangan buku-buku kiri di era orde baru.

Penelitian ini menginterpretasikan paradigma pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap pelarangan buku-buku kiri di era orde baru. Sehingga dalam memahami penelitian tersebut peneliti sebagai instrumen kunci.

Pemilihan penelitian kualitatif didasarkan pada apa yang diterapkan oleh Ahmad Subhan (2005: 22) dalam penulisan skripsinya yang mengutip Sugiyono, yakni, “Memahami makna di balik data yang tampak. Gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan tindakan orang sering mempunyai makna tertentu. Data untuk mencari makna dari setiap perbuatan tersebut hanya cocok diteliti dengan metode kualitatif.”

Metode kualitatif menjadi fokus dalam penelitian ini karena di bidang perpustakaan dan informasi saat ini mulai dikembangkan namun bukan berarti bahwa dalam penelitian ini peneliti cenderung untuk mengklasifikasikan ilmu

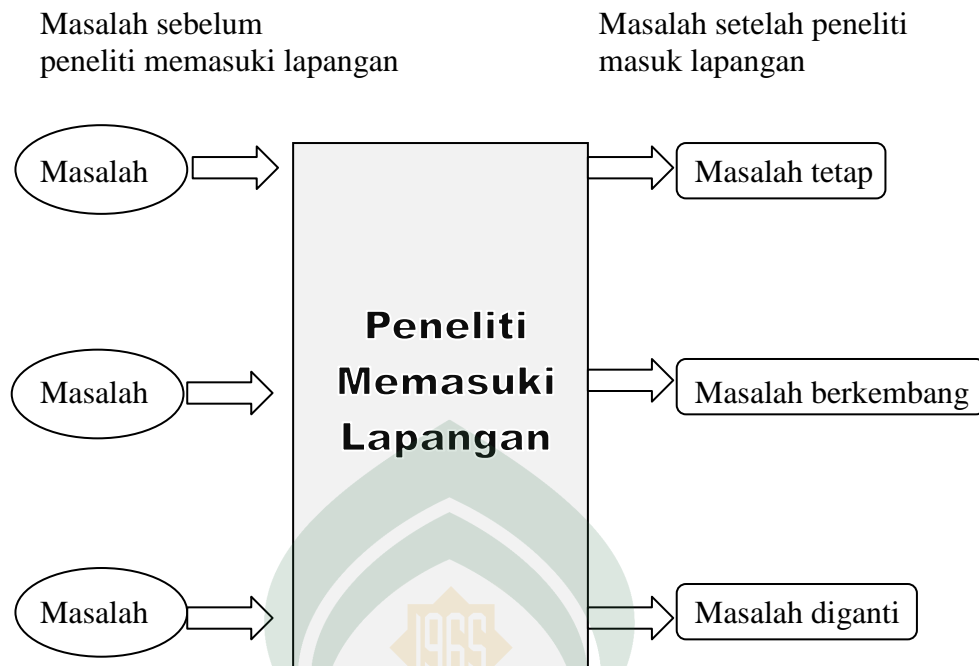
perpustakaan sebagai ilmu sosial, budaya atau humaniora”, akan tetapi seperti yang di jelaskan oleh Putu Laxman Pendit bahwa penelitian kualitatif dalam ilmu perpustakaan merupakan upaya menjadikan bidang ini multidisipliner dan interdisipliner. Sekaligus, upaya menjadikan metode kualitatif sebagai alternatif bagi metode kuantitatif adalah juga upaya membentuk kekhasan ilmu perpustakaan dan informasi yang sebelumnya disangka orang sebagai ilmu pasti-alam saja (Pendit, 2009: 9-10).

Dalam penelitian kualitatif, akan terjadi tiga kemungkinan terhadap “masalah” yang dibawa oleh peneliti,

1. Masalah yang dibawa oleh peneliti sejak awal sampai akhir penelitian tidak berubah.
2. Masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian dapat berkembang dengan memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan.
3. Masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan bisa saja berubah total, sehingga harus ganti masalah. Dengan demikian judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dan judulnya diganti.

Dalam institusi tertentu, judul yang diganti ini sering mengalami kesulitan administrasi, oleh karena itu institusi yang menangani penelitian kualitatif, harus mau dan mampu menyesuaikan dengan karakteristik masalah kualitatif ini (Sugiyono, 2009: 205).

Sugiyono (2009: 206) menjelaskan kemungkinan sebelum dan sesudah ke lapangan dalam penelitian kualitatif dapat digambarkan sebagai berikut :



B. *Data dan Sumber Data*

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam hal ini menggunakan sumber data untuk mendapatkan data yang diinginkan sesuai dengan objek penelitian.

Menurut Sugiyono dalam Ahmad Subhan (2008: 25) bahwa dalam pemilihan sumber data/informan, peneliti memiliki pertimbangan, alasan, dan tujuan tertentu. Dengan begitu, peneliti memilih sumber data secara purposive. Model pemilihan secara purposive adalah teknik pemilihan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Adapun pilihan sumber data yang diharapkan dalam penelitian ini

adalah pustakawan yang telah dinyatakan secara resmi memiliki syarat dan kualifikasi sebagai pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada penelitian ini penulis membagi menjadi beberapa orang yakni:

- a. Irvan Mulyadi, S.Ag.,SS.,MA selaku mantan Kepala Perpustakaan UPT Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- b. Himayah,S.Ag.,SS.,MLS selaku Kepala Perpustakaan UPT Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- c. Husaebah Fattah, S.Ag.,M.Hum selaku pustakawan UPT Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- d. Zainal, S.Hum selaku pustakawan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- e. Andi Mansyur, S.Hum selaku pustakawan UPT Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- f. Laode Rusadi, S.IP selaku pustakawan UPT Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Data tambahan yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah beberapa data yang telah menjadi arsip Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berupa hasil-hasil pengolahan data dan data yang berupa surat keputusan yang berhubungan dengan pengembangan koleksi serta pengolahan perpustakaan.

Pada proses wawancara sumber data peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh

sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat “perspektif emis” artinya memperoleh data bukan “sebagai mana harusnya”, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan dan dipikirkan oleh sumber data (Sugiyono: 2009: 213).

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka disingkat 3P untuk mengidentifikasikan dimana data menempel, yaitu :

1. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket misalnya siswa yang dijadikan responden.
2. Place, sumber data yang menyajikan data berupa tampilan keadaan diam atau bergerak. Diam misalnya : ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, dan lain-lain. Bergerak misalnya : aktivitas, kinerja, laju kendaraan, ritme kendaraan, kegiatan belajar mengajar. Keduanya objek untuk penggunaan metode observasi.
3. Paper, data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka gambar atau sumber lain, cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.

C. Instrumen Penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian utamanya adalah peneliti sendiri. Lincoln and Guba dalam Sugiyono (2009: 223) menyatakan bahwa :

“The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human is the initial and continuing mainstay. But if the human instrument

has been used extensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that the human instrument has product.”

Selanjutnya Nasution dalam Sugiyono (2009: 223) menyatakan dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka Instrumen yang diharapkan melengkapi data penelitian sesuai dengan objek yang diteliti dalam hal ini peneliti menggunakan tabel wawancara untuk mendapatkan informasi terkait mengenai pandangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang buku-buku kiri dan pelarangan buku-buku kiri di era orde baru.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 dua cara pengumpulan data untuk mendapatkan data yang diinginkan yaitu:

1. Data kepustakaan (*library research*) melalui metode ini penulis menggunakan beberapa sumber bacaan berupa buku, jurnal, majalah , serta akses online yang berhubungan judul yang diteliti.
2. Data lapangan (*field research*) melalui metode ini penulis menggunakan :

- a. Observasi: observasi dilakukan mulai dari tanggal 17 Januari – 17 Februari 2013.
- b. Wawancara : Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2009: 233), ada tiga macam wawancara, dua di antaranya sesuai untuk penelitian kualitatif yaitu:
 - 1) Wawancara Tak Terstruktur : Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
 - 2) Wawancara Semi Terstruktur : Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

Wawancara dilakukan peneliti di mulai dari tanggal 5 Februari – 26 Maret 2013. yang terbagi atas:

- 1) Tanggal 5 Februari 2013 wawancara dilakukan dengan Irvan Mulyadi, S.Ag.,SS.,MA selaku mantan Kepala Perpustakaan UPT Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar .
- 2) Tanggal 6 Februari 2013 wawancara dilakukan dengan Zainal, S.Hum selaku pustakawan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- 3) Tanggal 11 Februari 2013 wawancara dilakukan dengan Husaebah Fattah, S.Ag.,M.Hum selaku pustakawan Perpustakaan UPT Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
 - 4) Tanggal 25 Maret 2013 wawancara dilakukan dengan Andi Mansyur, S.Hum selaku pustakawan Perpustakaan UPT Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
 - 5) Tanggal 25 Maret 2013 wawancara dilakukan dengan Himayah,S.Ag.,SS.,MLS Kepala Perpustakaan UPT Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 - 6) Tanggal 26 Maret 2013 wawancara dilakukan dengan Laode Rusadi S.IP selaku pustakawan Perpustakaan UPT Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- c. Dokumentasi dilakukan pada tanggal 12-13 Februari 2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Pandangan Pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Terhadap Buku-buku Kiri*

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, peneliti menemukan beberapa buku-buku yang dikategorikan sebagai buku kiri, salah satu diantaranya buku yang diterbitkan oleh Penerbit Resist Book Yogyakarta. Resist book merupakan penerbit yang konsisten menerbitkan paham kiri yang memuat paham Marxisme-leninisme dan Komunisme sampai saat ini. Selain itu, di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar juga terdapat koleksi dari beberapa penerbit yang memuat isi paham marxisme atau leninisme.

Merujuk tahun masuk buku tersebut, bisa dikatakan bahwa buku kiri sudah dikoleksi sejak lama. Hal ini tidak terlepas dari tidak dibatasinya buku-buku tertentu untuk dijadikan koleksi perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Hasil wawancara mengenai pandangan buku-buku kiri oleh pustakawan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dapat dikatakan bahwa pada umumnya tidak ada masalah dengan buku-buku kiri. Pada Konteks wawancara tersebut ialah pandangan buku-buku kiri dalam ruang lingkup perpustakaan atau yang menjadi acuan pustakawan untuk mengoleksi bahan pustaka. Seperti yang disampaikan oleh informan sebagai berikut :

Buku-buku kiri tidak masalah kalau itu menambah wawasan dan keanekaragaman berpikir. Kita harus melihat sisi yang mananya yang

dianggap kiri. Sebab semua pemikiran punya kelebihan-kelebihan. (Husaebah, 11 Februari 2013)

Buku-buku kiri sebagai bahan pelajaran untuk mengetahui apakah komunis itu jelek atau bagus. (Irvan Mulyadi, 5 Februari 2013)

Selama ini buku kiri memang mendapat tempat yang agak terpinggirkan, bukan hanya karena adanya pelarangan namun juga pada kata kiri yang melekat pada istilah buku kiri. Istilah kiri di Indonesia selalu diidentikkan dengan Komunis atau paham marxisme serta leninisme, ini tidak terlepas dari kebijakan politik yang dilakukan oleh rezim orde baru dalam membendung paham komunisme di Indonesia yang dinilainya telah mengkhianati NKRI melalui pemberontakan Gerakan 30 September sehingga penulis maupun penerbit yang menerbitkan wacana kiri diberangus oleh kuasa rezim Soeharto. Mengenai hal tersebut, pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar juga mengakui bahwa memang terdapat stigma yang kurang baik terhadap buku-buku kiri, ini dikatakan dalam wawancara bersama pustakawan sebagai berikut :

Buku kiri kalau menurut saya perlu diluruskan istilah kiri ini, namun buku seperti itu bahwa ia adalah buku yang menulis tentang hal-hal yang bertentangan dengan agama, Kalau agama dianggap aliran kanan dan yang kiri yang bertentangan. (Himayah, 25 Maret 2013)

Senada dengan Munthe (2010), Andi Masyur mengemukakan lebih jauh pandangannya mengenai buku kiri, berikut petikannya wawancaranya :

Selama ini masyarakat telah salah kaprah mendefinisikan terminologi kiri begitu mendengar kata ini, pandangan yang langsung muncul adalah komunisme dan marxisme. Kita tidak bisa salahkan karena memang pengaruh pandangan semacam itu telah menyebarluas dan mendogma orang-orang. Kiri yang acap kali di identikan dengan komunis atau paham Marxis itu berkaitan dengan luka sejarah bertahun-tahun selama orde baru masyarakat dicekoki dengan pandangan bahwa komunisme terbukti telah melakukan penghianatan terhadap NKRI.

Paham komunisme menggunakan ajaran-ajaran marxisme sebagai semangat ideologisme, dengan demikian masyarakat menerima dengan mentah-mentah bahwa kiri selalu berarti komunis yang berlabel jahat. (Andi Mansyur, 25 Maret 2013)

Saya menyadari Buku kiri selama ini yang isinya dominan kritis dan mengkritisi kemapanan yang selama ini hidup dan menjadi kebenaran mutlak dimasyarakat. Yang sebenarnya mempunyai tujuan menciptakan kemajuan ilmu pengetahuan yang membuka pandangan bahwa cakupan pemikiran buku kiri ini tidak hanya sebatas komunisme dan marxisme. (Andi Mansyur, 25 Maret 2013)

Sangat susah untuk memperbaiki pandangan masyarakat tentang buku-buku kiri ini yang sudah mendarah daging dipemikiran masyarakat. Hal ini pasti akan sulit untuk mengubah pandangan karena kesalahpahaman ini menimbulkan reaksi antisipasi terhadap segala hal yang berbau kiri dan memilih menghindari bahkan mengkriminalisasi bahwa kiri hanya dilakukan oleh pemerintahan rezim orde baru tentang komunisme. (Andi Mansyur, 25 Maret 2013)

Selain itu, pandangan lain dari salah satu informan yang menjelaskan buku kiri itu tidak seperti yang dibayangkan, secara singkat dia menjelaskan bahwa :

Menurut saya buku kiri adalah buku pembebasan dogma dan buku yang mampu memperlihatkan kebenaran yang utuh dibalik rekayasa informasi publik. (Laode Rusadi, 26 Maret 2013)

Adanya pandangan yang tidak baik dari sebagian masyarakat selama ini tentang istilah kiri, tidak menjadi halangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk tidak boleh mengoleksi buku-buku semacam itu di Perpustakaan UPT UIN Alauddin Makassar dan Perpustakaan Fakultas-fakultas. Justru dengan mengoleksi buku tersebut masyarakat bisa mengetahui apakah memang baik atau tidak baik. Muatan buku kiri yang selama ini selalu dikaitkan dengan komunisme masih tertanam di pikiran oleh sebagian masyarakat. Pandangan pustakawan diatas, secara tidak langsung ingin menyampaikan

kekhalayak bahwa buku kiri tidak hanya sebatas membahas komunisme atau marxisme. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh salah seorang staff di Resist Book dalam komentarnya pada ulasan Tempo TV tentang *Buku Kiri di Persimpangan Jalan* sebagai berikut :

Kalau orang memahami kiri itu sebagai komunis mungkin itu akan sedikit, tapi kita memahami kiri itu sebagai bagian gerakan sosial yang mungkin “melawan arus yang selama ini dia dominan”. (Wahyu Winarno, 2011)

Bagi Eko Prasetyo yang merupakan salah satu penulis buku kiri yang cukup produktif yang 10 tahun terakhir ini telah menulis 30 buku mengatakan:

Thesis kiri selama ini disajikan sangat konservatif, ilmiah dan kaku. Orang selalu menstigmakan sifat kita lenin, itu baik, tapi bagaimana menterjemahkan kiri dalam konteks saat ini di Indonesia. (Eko Prasetyo, Penulis Buku Kiri, 2011)

Pernyataan dari Wahyu Winarno dan Eko Prasetyo memberikan gambaran bahwa buku kiri maupun thesis kiri yang selalu di stigmakan leninisme, komunisme atau marxisme harus dilepaskan dari kebencian yang berlarut-larut dan dari pernyataan mereka sekaligus memberikan penjelasan bahwa buku kiri adalah sebuah bacaan alternatif yang dijadikan sebagai bacaan yang memuat wacana gerakan sosial yang “melawan arus yang dominan”.

Bagi para pustakawan, yang diantaranya juga pernah terlibat sebagai selektor pengadaan buku mengatakan bahwa belum ada aturan pelarangan buku kiri yang diterima oleh pihak perpustakaan dari pemerintah. Meskipun tidak ada pembatasan koleksi yang dianggap terlarang di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, namun jika dilihat dalam Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 tahun 2007 dijelaskan pada pasal 12 ayat 3 dan 4 dinyatakan bahwa bahan pustaka

yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional. Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan secara terbatas. Yang dimaksud bahan perpustakaan yang dilarang menurut undang-undang nomor 4 tahun 1963 adalah barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khusus mengenai buletin, surat kabar, majalah dan penerbitan berkala. Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan, bahan perpustakaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional untuk didayagunakan secara terbatas.

Jaksa Agung Muda Intelijen Mohammad Amari (2010) menguraikan sepuluh kriteria buku yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan dapat menyebabkan peredarannya dilarang. Kriteria ketiga yang dilarang yaitu mengandung dan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Tentu dengan adanya kriteria ketiga menandakan bahwa sebenarnya pemerintah masih melarang buku-buku kiri. Mengenai buku-buku kiri yang seharusnya masuk dalam kriteria koleksi khusus, dalam pandangan salah satu informan di sampaikan sebagai berikut :

Menurut pendapat saya buku-buku kiri sebaiknya tidak semua “diparkir” sebab boleh jadi ada pendapat tokoh dari sebuah tulisan yang dijadikan objek kajian ilmiah dikalangan masyarakat akademisi, sebagai sebuah penemuan baru dalam dunia akademik. (Zainal, 11 Februari 2013)

Meskipun demikian, bagi pustakawan yang setiap tahunnya menyeleksi buku belum ada aturan secara khusus yang dijalankan oleh Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pengembangan koleksi

dikarenakan itu lebih kepada kebutuhan mahasiswa dalam menunjang aktivitas ilmiahnya. Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut :

Kalau selama ini saya sering terlibat dalam seleksi buku, ada banyak buku marxis yang kita koleksi. Sepanjang buku itu sesuai dengan dengan kebutuhan mahasiswa kita akan koleksi dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat. (Husaebah, 11 Februari 2013)

Sebelum-sebelumnya kita punya kotak usulan dari pembaca. Jadi mahasiswa boleh mengusulkan buku yang menarik atau yang pernah dia baca di tempat lain atau dia membutuhkan itu. Kotak usulan kemudian diproses kalau belum ada kita koleksi. (Husaebah, 12 Februari 2013)

Kalau di perpustakaan UIN Alauddin Makassar tidak dibuatkan petunjuk untuk mengatur bahwa buku-buku yang mengandung SARA atau memecah persatuan termasuk buku kiri dilarang masuk. (Irvan Mulyadi, 5 Februari 2013)

Meskipun memang ada beberapa perpustakaan yang kalau ada buku yang dilarang, mereka tetap mengoleksi akan tetapi disimpan ditempat yang tidak terbuka secara umum, tidak bisa dipinjam, hanya orang tertentu yang bisa masuk. Kalau disini belum ada aturan buku yang mengandung SARA dan memecah persatuan, dan buku kiri kita tidak seleksi (Irvan Mulyadi, 5 Februari 2013)

Kalau ada buku yang dipilih tidak sesuai dengan prodi harus membuatkan keterangan. (Irvan Mulyadi, 5 Februari 2013)

Mengenai pandangan yang dikemukakan oleh pustakawan tersebut pada dasarnya dilandasi alasan bahwa kondisi saat ini adalah kebebasan dan keterbukaan mendapatkan informasi. Apalagi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai perpustakaan yang berada dalam lingkungan perguruan tinggi memiliki fungsi sebagai wadah melakukan penelitian, sehingga tentu tidak bisa membatasi kebutuhan mahasiswa atau masyarakat kampus dalam mendapatkan informasi sesuai prodinya.

Kalau Buku-buku Kiri tidak apa-apa, Disini banyak buku paham marxisme-leninisme tercampur dengan koleksi-koleksi yang lain.

Perpustakaan harus mengoleksi tersebut untuk mengetahui apakah misalnya komunis itu baik dan untuk tersebut butuh referensi. (Irvan Mulyadi, 5 Februari 2013)

Buku-buku kiri kan perdebatan antara dua kelompok. Kita harus membuka akses, kalau dalam dunia akademik aliran apapun harus dikaji. (Irvan Mulyadi, 5 Februari 2013)

Kalau saya yang namanya perpustakaan Perguruan Tinggi tetap harus mengoleksi buku-buku kiri karena bisa saja dengan alasan pengetahuan dan penelitian. (Irvan Mulyadi, 5 Februari 2013).

Selain tidak adanya aturan yang mengikat untuk perpustakaan dalam mengoleksi buku-buku kiri, informan sebenarnya menyatakan ketertarikannya untuk mengoleksi buku-buku seperti itu. Lebih lanjut dalam wawancara informan menjelaskan sebagai berikut :

Ada memang perpustakaan justru tertarik mengoleksi buku-buku yang dilarang, sebenarnya itu menarik. Seharusnya kita kejar itu karena menarik rasa ingin tahu orang seperti apa. Kalau perpustakaan bisa menyiapkan lebih bagus dengan alasan penelitian. (Irvan Mulyadi, 5 Februari 2013).

Pemenuhan kebutuhan informasi untuk kepentingan penelitian dan akademik menjadi prioritas perpustakaan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sehingga setiap tahun perlu menyesuaikan kebutuhan kurikulum semua jurusan yang ada di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam melakukan seleksi, pustakawan bersama para ketua jurusan dan sekretaris jurusan atau dosen-dosen membentuk tim seleksi buku dalam memilih koleksi-koleksi yang dibutuhkan setiap prodi/jurusan. Hal ini di kemukakan oleh informan sebagai berikut :

Setiap tahun kalau ada anggaran, kita menyeleksi buku sesuai dengan acuan yakni sesuai kebutuhan jurusan atau prodinya. (Irvan Mulyadi, 5 Februari 2013)

Setiap tahun kalau ada anggaran yang disediakan oleh APBN kita kemudian membentuk tim seleksi yang anggotanya dari pustakawan dan dosen-dosen dalam hal ini diusulkan oleh ketua jurusan dan sekretaris jurusan dengan mengusulkan masing-masing kebutuhan sesuai dengan kurikulum prodi atau jurusannya. (Husaebah, 11 Februari 2013)

Meskipun tidak adanya lagi pembatasan memperoleh informasi di era reformasi ini, namun bagi pustakawan buku-buku yang mengandung SARA atau pornografi menjadi pertimbangan untuk dikoleksi. Hal ini dikatakan informan sebagai berikut :

Kecuali buku porno, itu kan bukan pangsa pasar UIN, kalau pornonya masalah kesehatan kita koleksi juga, kalau buku kiri saya biasa menyeleksi karena itu bacaan orang-orang politik. (Husaebah, 11 Februari 2013)

Tidak pernah ada pelarangan dalam mengoleksi kalau di perpustakaan, mungkin kalau toko buku bisa saja. Perpustakaan itu kan mengoleksi semua terbitan yang pernah ada demi menambah khasanah pengetahuan. (Husaebah, 11 Februari 2013)

Prinsipnya, kecuali dari segi moral yang dapat merusak moral itu menjadi tanggung jawab kita seperti pornografi. (Irvan Mulyadi, 5 Februari 2013)

Akan tetapi perlu dipahami bahwa sebagai pustakawan harus tetap memperhatikan etika dan norma dalam masyarakat kita, alasan agama, suku/ras dan pornografi harus tetap dihindarkan dari pembaca agar tidak memicu konflik sosial. (Zainal, 6 Februari 2013)

Adanya alasan membatasi buku-buku yang dianggap mengandung unsur SARA dan pornografi oleh pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ini dititikberatkan pada identitas kampus yang notabene adalah kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman sehingga buku seperti tersebut tidak menjadi prioritas karena dianggap dapat merusak moral, etika dan norma yang ada didalam masyarakat kampus.

Dalam penjelasan seorang pustakawan, bahwa jika ada pembatasan mengenai pengadaan koleksi di perpustakaan, tentu hal tersebut juga tidak terlalu berpengaruh.

Pembatasan koleksi di perpustakaan secara umum tidak berpengaruh hal ini dikarenakan koleksi yang dianggap memiliki informasi berbau “kiri” tidak semuanya dibutuhkan oleh pengunjung (pengguna) jasa layanan informasi, kebanyakan user membutuhkan buku-buku tersebut cenderung ingin memiliki untuk dijadikan referensi ketimbang dibaca sedikit-sedikit, yang membutuhkan waktu yang lebih banyak. (Zainal,6 Februari 2013)

C. *Pandangan Pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Terhadap Pelarangan Buku-buku Kiri Di Era Orde Baru*

Sejarah Indonesia sarat dengan kisah pelarangan buku, khususnya saat negara berada di bawah kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru. Di masa itu, pemerintah menerapkan aturan warisan kolonial Belanda, yaitu *Haatzai Artikelen*, sebutan untuk delik pidana bagi mereka yang dituduh menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, atau menghina penguasa kolonial.

Buku-buku kiri pernah menjadi wacana yang “seksi dan special” di Indonesia pada pascareformasi sekitar tahun 2000, namun pada saat ini buku kiri semakin kurang peminatnya. Jauh sebelum memasuki era reformasi masyarakat Indonesia telah mengenal bacaan kiri, sehingga bisa di katakan wacana kiri begitu eksis pada era orde lama di mana rezim tersebut menganut paham Nasionalisme, Agama, dan Komunis (NASAKOM). Pemerintahan Soekarno yang memasukkan Komunis sebagai ideologi Negara memberikan kesan bahwa pada masa itu wacana kiri sangat kuat. Senada dengan Wahab (2010) Andi Mansyur menjelaskan secara gamblang mengenai pelarangan buku-buku kiri, berikut petikan kutipannya :

Nasib buku-buku dinegeri ini harus diakui memang masih memprihatinkan, hingga kini masih sering terjadi pelarangan yang artinya buku sebagai media menyampaikan bahasa masih belum mendapatkan ruang demokrasi dinegeri ini. Meskipun Indonesia telah memberikan jaminan untuk berekspresi termasuk menulis dan juga pers tapi praktek-praktek pembatasan atas nama “ketertiban umum” masih terus terjadi. (Andi Mansyur, 25 Maret 2013)

Hukum sesungguhnya tidak boleh mencampuri, memaksa dan melarang perdebatan dan pencarian kebenaran sejarah itu. Tapi hukum baru hadir apabila salah satu pihak atau para pihak sudah mulai memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa pelarangan buku kiri justru memicu orang untuk mencari buku yang dianggap terlarang tersebut. Makin dilarang makin besar minat orang untuk membacanya. Hal ini disebabkan orang atau penulis memiliki pengaruh yang kuat sehinggalah rohnya tidak pernah mati sampai sekarang. Dengan demikian sesungguhnya sejarah telah membuktikan buku atau pemikiran yang baik, hebat, besar, sesungguhnya tidak pernah mati dan tidak akan pernah ada orang yang bisa melarangnya. Saatnya budaya warisan kolonial dan rezim otoriter yang selalu ingin mengatur arus informasi dan pemikiran diakhiri. Sejarah menunjukkan bahwa kebebasan berpikir menjadi pilar utama bagi lahirnya banyak pencapaian luar biasa di negeri-negeri besar. Jika pengetahuan mesti mengabdikan kepada kekuasaan semata, sangat mungkin ia akan gagal memahamkan kepada manusia tentang makna hidup yang beradab, hanya peradaban yang berpijak pada kebebasan dan pengetahuan yang akan mampu melahirkan pencerahan nalar. (Andi Mansyur, 25 Maret 2013)

Keberadaan buku-buku kiri pada rezim orde baru atau pemerintahan Presiden Soeharto menjadi barang yang sangat berbahaya untuk dikoleksi sehingga banyak orang-orang pada saat itu yang memiliki atau membaca buku kiri ditangkap dengan dugaan anggota PKI atau pengikutnya. Sehingga pada saat masa awal kepemimpinan Soeharto buku-buku kiri sangat jarang ditemukan seiring dengan pembersihan orang-orang PKI.

Bagi pustakawan UIN Alauddin Makassar keberadaan buku-buku kiri tidak semestinya menjadi momok yang menakutkan bagi rezim pemerintahan orde baru. Ini di sampaikan informan sebagai berikut :

Tidak masalah kalau itu menambah wawasan, kita harus melihat sisi yang mananya dianggap kiri ataupun dilarang, mungkin banyak informasi yang tidak bisa diakses pada saat itu, mungkin rezim tersebut membatasi karena dianggap radikal, ketakutan-ketakutan seperti itu sebenarnya tidak beralasan. (husaibah, 12 Februari 2013)

Di sisi lain buku-buku kiri sangat jarang ditemukan pada saat itu seiring dengan pembersihan orang-orang PKI dan antek-anteknya. Pelarangan buku-buku kiri yang terjadi di era orde baru sangat disesalkan dan menciderai proses demokrasi bangsa Indonesia pada saat itu. Ini tentu menjadi sejarah kelam yang tidak perlu terjadi, meskipun pelarangan buku sudah dimulai sejak masa kolonialisme atau awal kemerdekaan Indonesia dan sampai era saat ini, namun yang paling banyak terjadi pelarangan ialah di masa orde baru. Tentu pelarangan buku-buku kiri tersebut didasari oleh sebuah kepentingan tertentu oleh rezim yang mengungkung wacana kiri tersebut. Ini di sampaikan oleh dua orang infoman, berikut petikan hasil wawancaranya :

Kalau di era orde baru, kan untuk mempertahankan status quo, tidak boleh beredar tidak boleh dibaca karena berbahaya. (Irvan Mulyadi, 12 Februari 2013).

“Pelarangan buku yang terjadi di era orde baru menandakan adanya sikap politik pemerintah, yang pada saat itu Soeharto sebagai Presiden ingin menguatkan status quo dirinya sebagai presiden seumur hidup. Tentu saja hal tersebut sangat merugikan dunia kepustakaan sebab banyak bacaan-bacaan penting yang mestinya dinikmati masyarakat pada saat itu, akan tetapi adanya pelarangan dari kejaksaan.” (Laode Rusadi, 12 Februari 2013)

Adanya agenda pelarangan wacana kiri yang dilakukan rezim orde baru dalam memberangus ajaran kekirian dimulai dengan melarang buku-buku kiri pada saat itu, sehingga sangat kuat dugaan bahwa alasan pelarangan itu dilandasi kebijakan politis. Pelarangan tersebut diperkuat dengan melalui undang-undang 4

tahun 1963 tentang barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Adapun tanggapan pustakawan mengenai pelarangan buku-buku kiri di era orde baru sebagai berikut :

Dari beberapa pustakawan yang menjadi informan pada umumnya mengemukakan bahwa pelarangan buku pada era orde baru semestinya tidak terjadi sebab hal itu tentu mengukung kebebasan mendapatkan pengetahuan sehingga bisa saja masih terdapat dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung dari rezim pelarangan tersebut. Hal tersebut diungkapkan beberapa informan sebagai berikut :

Dampaknya, mungkin sisi negatifnya banyak informasi yang tidak bisa diakses. Mungkin sisi positifnya untuk membatasi pemuda yang radikal akan tetapi sebenarnya tidak ada pembatasan karena pembatasan-pembatasan itu adalah ketakutan yang tidak beralasan (Husaibah, 12 Februari 2013)

“Dampak pelarangan buku-buku kiri pada era orde baru terhadap perkembangan perpustakaan kini tidak berpengaruh sebab perpustakaan tidaklah bergantung pada koleksi-koleksi tersebut. Harus dipahami bahwa masyarakat kita adalah masyarakat heterogen dengan latar belakang yang berbeda-beda, kemudian jika dikaitkan dengan dasar Negara kita yaitu pancasila maka keyakinan akan ideology ini semakin kuat, sehingga “provokasi” tulisan yang berbau kiri dapat ditangkal, pemahaman saya tulisan yang berbau kiri adalah apa yang dipahami oleh masyarakat, pemerintah yang bisa “merongrong” ideology Negara dan pemerintah. Kemudian suasana demokrasi di Indonesia tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa dipengaruhi oleh paham marxisme, sosialisme dan komunisme” (Zainal, 6 Januari 2013) .

Larangan buku di perpustakaan tidak berdampak terlalu besar, mungkin kalau dilarang paling penerbitnya akan tetapi jika telah disimpan di perpustakaan itu tidak masalah/tidak menjadi persoalan. (Irvan Mulyadi, 12 Februari 2013).

Hal yang berbeda di ungkapkan oleh Zainal, dalam penjelasannya bahwa perpustakaan tidaklah tergantung pada koleksi-koleksi yang mengandung spektrum pemikiran kiri sehingga tidak mempengaruhi perkembangan

perpustakaan saat ini. Di sisi lain buku kiri juga hanya di baca oleh kalangan tertentu yang memang membutuhkannya sehingga ketakutan-ketakutan yang tidak berasal dari pemerintah seperti yang di ungkapkan oleh Husaebah tidak menjadi masalah. Lebih lanjut informan mengemukakan :

“Selama buku itu cuman memperkenalkan bahwa ada aliran-aliran selain agama, tidak ada masalah yang penting dia tidak mengajak, kalau hanya sekedar informasi bahwa ada aliran kiri dan kanan. Kecuali yang mengandung pornografi. (Himayah, 22 Maret 2013)

Semua Koleksi tetap dikoleksi dan ditampilkan diruang khusus dan tidak semua orang bisa membacanya hanya kalau diizinkan meneliti dia berikan izin. (Husaebah, 11 Februari 2013)

Kalau saat ini sudah tidak lagi, mungkin yang penodaan-penodaan agama. Ada juga, supaya tidak terjadi klas-klas. (Husaebah, 11 Februari 2013)

Kecuali buku porno, itu kan bukan pangsa pasar UIN, kalau pornonya masalah kesehatan kita koleksi juga, kalau buku kiri saya biasa menyeleksi karena itu bacaan orang-orang politik. (Husaebah, 11 Februari 2013)

Tidak pernah ada pelarangan dalam mengoleksi kalau di perpustakaan, mungkin kalau toko buku bisa saja. Perpustakaan itu kan menerbitkan seluruh terbitan yang pernah ada demi menambah khasanah pengetahuan. (Husaebah, 11 Februari 2013)

Pada umumnya Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tidak mempunyai syarat-syarat dalam mengoleksi atau menyeleksi buku walaupun pernah ada pelarangan buku-buku kiri namun hal itu tidak berarti menghalang pengembangan koleksi perpustakaan.

Selain itu pada umumnya, pustakawan berpendapat bahwa adanya pelarangan buku-buku kiri di era orde baru tidak memengaruhi kondisi masyarakat saat ini. Hal ini dijelaskan oleh salah satu informan sebagai berikut :

Menurut pendapat saya, tidaklah berpengaruh masyarakat tetap hidup dalam tatanan kehidupan yang harmonis dengan berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Kemudian suasana demokrasi Indonesia tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa dipengaruhi oleh paham marxisme, sosialisme, dan komunisme. (Zainal 6 Februari 2013)

Dalam konteks Negara Indonesia saat ini, apa yang telah terjadi dimasa orde baru sudah semestinya menjadi bahan pelajaran buat kita semua, sehingga pustakawan merasa tidak perlu lagi ada pelarangan buku apalagi yang sifatnya politis. Pustakawan tersebut kemudian mengemukakan dalam wawancaranya sebagai berikut:

Menurut pendapat saya meskipun sekarang sudah reformasi tetapi kita harus tetap menjaga suasana kedamaian dan stabilitas keamanan nasional Negara kita, kalau buku-buku kiri yang dimaksud dapat menciderai suasana kebangsaan yang aman damai sebaiknya dilarang tetapi kalau dapat berjalan beriringan sebaiknya diterima dengan syarat tetap mempertimbangkan alasan politik, agama, ras, pornografi, dan penerbitan asing sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sulisty Basuki. (Zainal 6 Februari 2013)

Pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar juga menganggap bahwa persoalan ketakutan-ketakutan akan terpengaruhnya pembaca buku-buku seperti itu sesungguhnya tidak dapat dijadikan acuan awal untuk melarang buku-buku kiri pada saat orde baru sebab hal itu kembali kepada individu masing-masing. Untuk saat ini pula, pustakawan berpendapat bahwa seharusnya tidak boleh dilarang lagi.

“Harusnya kan tidak boleh dilarang nanti orangnya sendiri yang mengolahnya, jadi tergantung orangnya. Saya membaca terorisme bukan berarti menjadi terorisme, cuman kita mau mengetahuinya. (Husaebah, 11 Februari 2013)

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan riset terhadap pandangan para pustakawan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap buku-buku kiri dan pelarangan buku-buku kiri di era orde baru, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Buku-buku kiri merupakan bacaan kritis atau bacaan politik yang dimana muatannya selalu diidentikkan mengajarkan komunisme, leninisme, marxisme. Namun, untuk konteks saat ini, buku kiri tidak hanya sebatas ajaran tersebut, tetapi bagi sebagian orang buku kiri memiliki muatan sebagai gerakan sosial yang melawan arus yang dominan.
2. Pada umumnya, pustakawan menyebutkan bahwa buku-buku kiri merupakan bahan pustaka yang harus dikoleksi oleh perpustakaan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai bagian dari kebutuhan mahasiswa dalam menambah wawasan pengetahuan.
3. Perpustakaan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tidak memiliki aturan khusus dalam menyeleksi bahan pustaka, namun untuk buku-buku yang tidak sesuai dengan identitas kampus islam, maka buku-buku seperti SARA dan pornografi tidak dijadikan koleksi. Jikapun dikoleksi, ditempatkan pada ruangan khusus, dan tentunya untuk mengaksesnya terbatas sesuai ketentuan yang diberlakukan perpustakaan.
4. Perpustakaan yang ada di dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan perpustakaan perguruan tinggi yang

dimana memiliki fungsi untuk penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Sehingga perpustakaan harus mengakomodasi buku-buku apapun untuk kepentingan akademik/penelitian mahasiswa.

5. Adanya pelarangan buku-buku kiri pada oleh pemerintah pada era orde baru, bagi pustakawan kebijakan tersebut bersifat politis, karena untuk menguatkan status quo pemerintahan rezim orde baru. Namun disisi lain, kuat dugaan dikarenakan wacana kiri dianggap mengancam stabilitas dan ketertiban Negara.
6. Bagi pustakawan dampak pelarangan buku-buku kiri yaitu banyaknya informasi yang kemudian tidak dapat diakses.

B. Saran

Adanya buku-buku kiri di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menandakan bahwa tidak adanya kriteria atau aturan yang menjadi prinsip dasar sebagai acuan dalam mengoleksi buku-buku, namun telah dijelaskan bahwa Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan terdapat aturan bahwa buku-buku yang dilarang tidak dapat dikoleksi kecuali menjadi koleksi khusus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Pada umumnya proses pengadaan buku-buku kiri didasari atas keputusan pustakawan sendiri yang ada di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar namun dikatakan pula bahwa buku yang mengandung unsure SARA dan pornografi di pertimbangkan untuk dikoleksi. Maka dari itu, peneliti kemudian memberikan saran kepada pihak perpustakaan untuk membuat aturan secara tertulis tentang aturan dalam pengembangan koleksi karena meskipun tidak ada

larangan untuk mengoleksi buku-buku kiri namun masih ada buku-buku yang lain seperti yang mengandung unsure pornografi tidak dikoleksi. Saran yang lain, karena pustakawan yang berada didalam sebuah perpustakaan akan mengalami regenerasi maka bisa saja kebijakan-kebijakan lain mengenai seleksi buku bersifat subjektif dikarenakan tidak ada acuan secara tertulis.



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Alfrizal. "Pustakawan Sebagai Tenaga Profesional di Bidang Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi", *Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca*, Vol. 22, no 1 (Januari-Juni 2006).
- Basuki, Sulistiyono. 1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Basuki, Sulistiyono, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- "Buku". *Wikipedia Enklopedia Bebas*, <http://id.wikipedia.org/wiki/buku> (27 Agustus 2012)
- Dewiyana, Himma. "Kompetensi dan kurikulum perpustakaan : Paradigma baru dan dunia kerja di era globalisasi informasi". *Pustaka jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi*. Vol. 2 No. 1 (2006): h. 22-23.
- Dewiyana, Himma. "Kompetensi dan Kurikulum Perpustakaan", *USU Repository*, 2008, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/635/1/132316961.pdf> (22 Januari 2013)
- Elsam, *Pelarangan Buku Tidak Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*, <Http://www.elsam.or.id>. Tanggal 28 Agustus.
- Ilmu Perpustakaan dan Informasi (Iperpin). diskusi dan ulasan ringkas, *Kepustakawanan*. <http://iperpin.wordpress.com/kepustakawanan/> (22 Januari 2013)
- Iboekoe, *Penerbitan Buku Lesu*. <Http://Indonesiabuku.com>. (27 Agustus 2012)
- Iboekoe, *Pelarangan Buku Tidak Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. <Http://Indonesiabuku.com> Tanggal 27 Agustus 2012.
- Iboekoe, *Inilah Sepuluh Kriteria Pelarangan Buku*. <Http://Indonesiabuku.com> Tanggal 27 Agustus 2012.
- Jaringan Kerja Budaya, *Menentang Peradaban Pelarangan Buku Di Indonesia*, Jakarta : Lembaga Studi Advokasi dan Masyarakat (ELSAM), 1999.
- Kajian teoritis pustakawan*, <repository.usu.ac.id/bitstream/27114/Chapter%20II>. (23 Februari 2013)
- Key Gates, Jean, *Introduction To Librarianship*, New York : McGraw-Hill Book Company, 1989.

- Knuth, Rebecca, *Libricide : The Regime-sponsored Destruction of Books and Libraries in the Twentieth*. Westport, Connecticut, London: Preager, 2003.
- Koswara, *Dinamika Informasi Dalam Era Global*, Bandung : Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Jawa Barat bekerjasama dengan Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 1998.
- Kumpulan tulisan, *Pelarangan Buku di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. [Http://www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id). Tanggal 28 Agustus.
- Kurnia, Anton. “Mengapa Kiri Di Benci ?” *Ultimus Online*, 10 november 2009 http://www.ultimasonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=144:mengapa-kiri-dibenci&catid=24:feature&Itemid=78. (22 Januari 2013)
- Lasa HS. *Pengelolaan Terbitan Berkala*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- Lasa HS. *Jenis-Jenis Pelayanan Informasi Perpustakaan*. Yogyakarta : Gajah Mada University, 1994
- Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. “But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation”. *New Directions for Proaram Evaluation*, No. 30 (1986): h. 73-84.
- Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. *Naturalistic inguily*. Beverly Hills, CA: Sage, 1985.
- “Lontar”. *Wikipedia Enkslopedia Bebas*, <http://id.wikipedia.org/wiki/lontar> (27 Agustus 2012)
- Marshall, Patricia. *Mengapa Beberapa Orang Lebih Sukses Dari Yang Lainnya?. Manusia dan Kompetensi Panduan Praktis Untuk Keunggulan Bersaing*, ed. Boulter, Murray Dalziel, dan Jackie Hill. terj. Bern. Hidayat. Jakarta: Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer, 2003.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogyakarta : Rake Sarasin, 1996
- Munasichin, Zainul, *Berebut Kiri : Pergulatan Marxisme Awal di Indonesia 1912-1926*, Jogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2005.

- Munthe, Maria Puspitasari. "Kiri". Maria Puspitasari Munthe, Selasa, 08 Juni 2010. <http://mariapuspitasari.blogspot.com/2010/06/kiri.html> (23 Januari 2013)
- Nasution. *Metodologi Penelitian Naturalistic*, Bandung : PN. TARSITO, 1998.
- Pendit, Putu Laxman, *Merajut Makna: Penelitian Kualitatif Bidang Perpustakaan dan Informasi*, Jakarta Cita Karya Karsa Mandiri , 2009.
- "Perpustakaan Perguruan Tinggi: Buku Pedoman". Jakarta: Direktorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, 2004.
- Putri, Agung, "Pelarangan Buku : Otoritarianisme dari zaman ke zaman". Jakarta: ASASI Bulletin Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2010, [Elsam.or.id](http://www.elsam.or.id), <http://www.elsam.or.id/?id=419&lang=en&act=view&cat=c/403>. (23 Januari 2013)
- Rahayuningsih. *Pengelolaan Perpustakaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Razif, "*Bacaan Liar*" *Budaya dan Politik Pada Zaman Pergerakan*, Edi Cahyono's Experience ([Http://www.geocities.com/Edicahy](http://www.geocities.com/Edicahy)), 2005.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Perpustakaan (UU Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007*, Jakarta : Penerbit Asa Mandiri, 2007.
- Rizaloni, Rio. "Buku Kiri di Persimpangan Jalan", *Tempo TV Assiacallingjkt*, 9 Desember 2012. <http://www.youtube.com/watch?v=HDrLWcM6zLk> (5 Januari 2013)
- Robet, Robertus. *Librisida: Pemurnian Masyarakat dan Demokrasi yang Cacat*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) . http://www.elsam.or.id/downloads/1268796788_02._Pembakaran_Buku_d_i_Era_Demokrasi.doc. (23 Januari 2013)
- Rumani, Sri. *Kompetensi Pustakawan dan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Perpustakaan Nasional*. Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - non-atma jaya Visipustaka: Majalah Perpustakaan vol. 10 no. 3 (2008), page 16-20.
- Saleh, Abdul Rahman, *Pengantar Kepustakawanan*, Jakarta : CV Sagung Seto, 2009.

- Subhan, Ahmad, *Pandangan Selektor pada Tahun 2005-2006 di Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Buku-buku Kiri: Studi Kasus Buku-buku Produk Penerbit Resist Book*, Yogyakarta : Skripsi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Subrata, Gatot. *Upaya Pengembangan Kinerja Pustakawan Perguruan Tinggi Di Era*, Yogyakarta : Perpustakaan UM, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Penerbit Alfabeta, 2012.
- Tugas & Fungsi Perguruan Tinggi. <http://imtajogja.blogspot.com/2011/01/tujuan-dan-fungsi-perpustakaan.html> (23 Januari 2013)
- Tuwu, Alimuddin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1993.
- Wahab, Oki Hajiansyah, “Menggugat Pelarangan Buku”. *Lampung Post*. 21 Januari 2010
<http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010012101321966> (27 Agustus 2012)
- Yusuf, Iwan Awaluddin dkk, *Pelarangan Buku Di Indonesia :Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi*,Yogyakarta:PR2Media, 2010.
- Yusuf, Iwan Awaluddin. *et al, Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi*. Yogyakarta: PR2Media, 2010. <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07640.pdf> (27 Agustus 2012)
- Yulianeta, *Cap Bacaan Liar pada Novel Propoganda Politik*, 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Irsan lahir di desa Karrang kabupaten Enrekang, 27 Mei 1990. Mulai mengenyam pendidikan pada tahun 1997 di SDN 52 Karrang, setelah lulus pada tahun 2002 kemudian melanjutkan ke SMPN 5 Kabere, dan setelah itu melanjutkan ke SMAN 1 Enrekang pada tahun 2005. Berkat dukungan dan motivasi dari kedua orangtua Muh. Rusdi Musba dan Sumarni yang selalu ingin melihat anaknya memiliki pendidikan lebih baik untuk melanjutkan sekolahnya yang lebih tinggi.

Berhasil menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Enrekang, anak kedua dari tujuh bersaudara ini melanjutkan jenjang pendidikan S1 pada tahun 2008 dengan mengambil jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyelesaikan studinya, Irsan mengkaji tentang pandangan pustakawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap pelarangan buku-buku kiri di era orde baru di bawah bimbingan Dra. Hj. Surayah, M.Pd., dan Muh. Quraisy Mathar, S.Sos., M.Hum.

Saat ini dalam keseharian penulis sementara melakukan beberapa penelitian tentang perpustakaan dengan melakukan observasi langsung kemudian menuliskan hasil penelitian melalui media online, sosial media, maupun koran-koran lokal. Meskipun masih dalam tahap pembelajaran namun langkah yang digeluti didunia perpustakaan kini menjadi fokus kedepannya. Jika didalam skripsi ini ada saran dan masukan yang membangun atau ingin berdiskusi silahkan hubungi melalui email irsanjip@rocketmail.com.